

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama mengenai epidemi HIV/ AIDS sebelumnya pernah dilakukan oleh Nabila Rizka Febrina, yang berjudul “Peran *World Health Organizations* (WHO) Dalam Mengatasi Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (MTCT) Di Thailand Periode 2010-2016”¹⁹ dalam penelitian ini membahas peran *World Health Organizations* (WHO) dalam mengatasi penularan HIV dari ibu ke anak di Thailand periode 2010 - 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh WHO dalam mengeleminasi tingkat MTCT di Thailand sehingga dapat mencapai angka di bawah 2%. Penurunan angka MTCT di Thailand mencapai angka yang sesuai dengan kriteria WHO pada tahun 2016. Thailand diakui sebagai negara pertama yang dapat mengeleminasi tingkat MTCT di Asia Tenggara.

Pada penelitian ini, Nabila menggunakan metode kualitatif. Dengan pengumpulan data wawancara dengan salah satu representatif dari WHO Thailand yaitu Gopinath Deyer dan Joseph Wong, wakil rektor yang meneliti tentang HIV di Thailand serta studi literatur, yakni melalui buku, jurnal, dokumen pemerintah, serta sumber terkait lainnya. Kemudian, pada penelitian ini Nabila menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep keamanan manusia. Berdasarkan konsep keamanan manusia, dijelaskan bahwa HIV adalah suatu ancaman bagi Thailand. Sedangkan konsep organisasi internasional membantu menjelaskan peran dan

¹⁹ Febrina, Nabila Rizka. 2019. Peran World Health Organizations (WHO) Dalam Mengatasi Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (MTCT) Di Thailand Periode 2010-2016. Skripsi.

fungsi WHO sebagai organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah di suatu negara antara lain melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan dan konseling, merekomendasikan pedoman-pedoman untuk melakukan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, serta membentuk mitra dengan badan-badan PBB lainnya untuk lebih fokus bergerak memberantas permasalahan HIV, termasuk di dalamnya memberantas MTCT.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan penurunan tingkat MTCT di Thailand merupakan hasil dari komitmen WHO dan pemerintah hingga Thailand dapat menurunkannya di angka 1,9% di tahun 2015. Peran WHO dalam mengatasi MTCT di Thailand di tahun 2010-2016 adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam meneliti obat zidovudine dan merekomendasikan pedoman-pedoman untuk melakukan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, merekomendasikan penggunaan susu formula kepada bayi yang terpapar HIV, mengimplementasikan opsi-opsi yang menjadi peran utama dalam penurunan tingkat MTCT di Thailand, serta pengembangan dan pelatihan konseling untuk para konselor di Thailand. Selain itu, WHO juga membentuk UNAIDS bersama dengan badan-badan PBB lainnya untuk lebih fokus bergerak memberantas permasalahan HIV, termasuk di dalamnya memberantas MTCT.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama yaitu, penulis menggunakan beberapa NGO yang penulis gunakan pada penelitian ini seperti UNAIDS, NTP+,RSAT dan TRCS sebagai unit analisis dalam menangani masalah epidemi HIV/AIDS dalam mencapai tujuan no 3 SDGs dalam kasus epidemi HIV/AIDS di Thailand. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Nabila hanya berfokus pada UNAIDS dan WHO. Kemudian objek penelitian yang dilakukan

pada penelitian ini yaitu masyarakat Thailand di kalangan keragaman gender, sementara pada penelitian yang dilakukan Nabila hanya berfokus pada TMCT saja.

Penelitian kedua dilakukan oleh Suchada Thaweessit dan Rosalia Sciortino yang berjudul “*The invisible intersectionality of female gender in Thailand’s response to the HIV epidemic*”²⁰. Penelitian ini menggunakan perspektif feminisme untuk menganalisis pespons Thailand terhadap epidemi HIV sejak awal tahun 1984 hingga saat ini. Suchada dan Rosalina berpendapat bahwa kebijakan pencegahan HIV pada umumnya tidak sensitif terhadap gender dan hanya mulai memberikan perhatian terbatas pada kebutuhan perempuan antara tahun 1997 dan 2011. Selain itu, jurnal ini berpendapat bahwa Sensitivitas gender meningkat pada periode 2012-2019, tetapi kemudian lebih kepada laki – laki yang berhubungan seks dengan laki – laki dan komunitas Transgender dari pada perempuan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, ada beberapa program yang sudah dijalankan Thailand dalam menangani epidemi HIV ini, seperti strategi Nasional Promosi Kondom, diluncurkan sebagai bagian dari Rencana Operasional Nasional Percepatan Penanggulangan AIDS 2015-2019. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan tingkat penggunaan kondom di kalangan anak muda. Setelah itu ada strategi pendidikan seksualitas komprehensif (CSE). Tanggapan kebijakan HIV terbaru, dengan membentuk bagian dari Strategi AIDS Nasional untuk 2017-2030, mengadvokasi bahwa remaja usia sekolah terlepas dari jenis kelamin, usia, agama atau etnis harus menerima pendidikan HIV dan seksualitas komprehensif yang sesuai usia untuk mencegah kehamilan dini dan HIV.

²⁰ Suchada Thaweessit & Rosalia Sciortino .2020. The invisible intersectionality of female gender in Thailand’s response to the HIV epidemic. *Culture, Health & Sexuality*. 22:7, 762-777.

Pada jurnal ini Suchada dan Rosalina berpendapat, Secara umum, respon HIV di Thailand mengabaikan hubungan kekuatan gender dan efek merugikan dari persinggungan antara gender perempuan dan status sosial mereka yang kurang beruntung lainnya. Ide-ide yang berkembang dalam merespon kebijakan Thailand untuk mengakhiri epidemi ini tercermin dalam empat program utama yang meliputi pencegahan dan pengobatan HIV. Seperti halnya kebijakan, program-program ini lebih memperhatikan gender dan perempuan dan anak perempuan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian, jurnal ini juga berpendapat bahwa tanggapan gender adalah bagian penting dari kebijakan dan program HIV yang perlu dilakukan di Thailand ingin mencapai tujuannya untuk mengakhiri epidemi HIV pada tahun 2030.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua yaitu, penulis lebih membahas kebijakan sosial dan politik yang dilakukan TAN dan pemerintah Thailand dalam menangani epidemi HIV/AIDS di kalangan keragaman gender di Thailand tahun 2019 – 2022, sementara pada penelitian yang dilakukan Suchada berfokus pada hubungan kekuatan gender pada kasus epidemi HIV di Thailand.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurul Anisa Asri, Muhammad Nasir Badu dan Pusparida Syahdan dengan judul “Peranan United Nations Joint Program On HIV/AIDS (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS Di Zimbabwe”²¹. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik

²¹ Anisa, Nurul Sri, dkk. 2019. Peranan United Nations Joint Program On HIV/AIDS (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS Di Zimbabwe. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 1 No. 1 2021.

pengumpulan data-data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, dan berbagai sumber valid.

Kemudian, jurnal ini menjelaskan bahwa Hubungan kerjasama antara pemerintah Zimbabwe merupakan salah satu dari sekian banyak fenomena hubungan internasional dalam hal ini state actor dan non state actor. Ketika berbicara mengenai pola hubungan kerjasama yakni negara Zimbabwe dan Organisasi internasional UNAIDS. Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas- batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Nurul, dkk juga menjelaskan terkait bentuk dari organisasi internasional, hal ini di jelaskan dalam dua kategori organisasi internasional oleh Ley Roy Bennet berikut ini:

1. Organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organizations/IGO*), anggota berasal dari perwakilan negara seperti : PBB, WTO, NATO.
2. Organisasi non pemerintah (*Non-governmental organizations/NGO*), anggotanya berasal dari kelompok non negara seperti kelompok bidang keilmuan, budaya, ekonomi, HAM. Contohnya Palang Merah, greenpeace Dengan demikian, jelaslah bahwa suatu organisasi

internasional dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama oleh para anggotanya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UNAIDS sebagai sebuah organisasi internasional menjadi bantuan dan penyalur bantuan luar negeri kepada Zimbabwe bekerja sama dengan pemerintah Zimbabwe untuk mengurangi tingkat penderita di negara tersebut. Keberadaan UNAIDS di Zimbabwe telah mempengaruhi penurunan tingkat penderita HIV/AIDS. Namun, upaya kerjasama ini memiliki hambatan yakni kondisi perekonomian dan sumber daya manusia di Zimbabwe yang kurang baik. Selain itu faktor kebudayaan masyarakat yang cukup sulit menerima perubahan akan suatu hal juga menjadi salah satu hambatan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan maupun perbedaan. Beberapa diantaranya menganalisis terkait peran Pemerintah dan organisasi Internasional seperti WHO dan UNAIDS, adapun penelitian dengan negara sebagai unit analisis dalam penelitiannya serta penggunaan konseptual yang bervariasi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran maupun informasi sebagai referensi terkait penanggulangan HIV/AIDS yang berguna terhadap penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penulis menggunakan *Transnational Advocacy Networks* sebagai unit analisis dalam menangani masalah epidemi HIV/AIDS dalam mencapai tujuan no 3 SDGs dalam kasus epidemi HIV/AIDS di Thailand. Penggunaan konsep organisasi internasional dan konsep *Transnational Advocacy Networks* sebagai alat analisis untuk menganalisis implementasi fungsi *Transnational Advocacy Networks* sebagai NGO

di Thailand serta kebaruan dari pengkajian penelitian ini yaitu penulis mengkaji peran TAN dalam upaya membantu pemerintah Thailand dalam kurun waktu tahun 2019 – 2022. .

2.2 Teori dan Konsep

Dalam subbab ini, peneliti akan menguraikan konsep dan teori yang akan digunakan untuk mengkaji topik yang penulis bahas, penulis menggunakan 2 konsep dan kerjasama internasional, sedangkan untuk teori, penulis menggunakan 1 teori yakni konsep organisasi internasional dan teori *Transnational Advocacy Networks* yang dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan aktor non-negara yang memiliki peran sangat penting dalam dinamika hubungan internasional. Organisasi internasional mulai hangat dibicarakan semenjak satu abad yang lalu di negara barat sebagai lembaga formal yang berkembang di abad ke-20 adalah kerjasama internasional. Sebelum adanya organisasi internasional, telah ada aliansi militer, organisasi antar pemerintah diantara negara-negara yang berdaulat, serta adanya aktor nonnegara internasional seperti gereja katolik dan kekaisaran romawi.

Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization* mengatakan, organisasi internasional merupakan suatu struktur yang formal dan berkelanjutan karena dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan anggota-anggota organisasi tersebut baik itu pemerintah atau non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan bersama dengan anggotanya. Sebuah organisasi tidak dapat dikatakan sebagai organisasi

internasional apabila belum/tidak memenuhi syarat sebagai organisasi internasional, seperti yang dikemukakan oleh Clive Archer yaitu:²²

1. Tujuannya harus merupakan tujuan internasional.
2. Harus memiliki anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara masing-masing.
3. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar (*headquarter*) demi kelangsungan organisasi.
4. Pejabat atau pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa atau negara.
5. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (*independent*) dan harus masih aktif. Organisasi yang sudah tidak aktif lebih dari 5 tahun tidak akan diakui lagi.

Theodore Coulombis dan James Wolfe juga menjelaskan tujuan-tujuan terbentuknya organisasi internasional, yaitu :²³

1. Sebagai pengatur antara hubungan aktor internasional di dalam hubungan internasional mengenai penyelesaian sengketa dan isu-iu dalam sistem internasional
2. Untuk mengontrol konflik-konflik di dalam sistem internasional

²² Cliver Archer. *International Organizations*. 2001. London & New York: Routledge..

²³ Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe . 1981 . *Introduction International Relations : Power And Justice*. New Delhi : Prentice-Hall of India.

3. Sebagai saranan untuk mempromosikan kerja sama dan kegiatan pembangunan antar Negara dengan tujuan kepentingan social dan ekonomi dan bantuan kemanusiaan
4. Sebagai pertahanan kolektif dalam menghadapi ancaman eksternal.

Pada hakikatnya peran organisasi internasional diatas menunjukkan bahwa organisasi internasional memang dibutuhkan dalam hubungan internasional demi ketercapaian kepentingan negara dan permasalahan dunia yang tidak terselesaikan sejalan dengan lajunya perkembangan globalisasi. Permasalahan mengenai sosial, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, HAM, *human trafficking* dan lain sebagainya tidak dapat diselesaikan hanya dengan peran dari pemerintah saja, namun diperlukan kerjasama dari berbagai kalangan melalui organisasi internasional. Organisasi Internasional dapat mencakup semua negara di dunia. Namun, ada juga organisasi internasional yang hanya terbatas di wilayah tertentu saja, misalnya negara-negara di Asia Tenggara yang membentuk suatu organisasi internasional tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Keterkaitan antara konsep organisasi internasional dengan penelitian ini yaitu, dilihat dari teori yang penulis gunakan yaitu teori *Transnational Advocacy Networks* yang mana pada TAN tersebut adalah perkumpulan organisasi-organisasi internasional maupun organisasi masyarakat untuk menangani epidemic HIV/AIDS di Thailand, sehingga konsep organisasi internasional sangat relevan untuk penelitian ini.

2.2.2 Konsep Kerjasama Internasional

Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerja sama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional yaitu suatu interaksi yang dilakukan aktor-aktor hubungan internasional untuk mencapai suatu tujuan kerjasama internasional.²⁴ Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena tujuan internasional seperti berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, social, lingkungan hidup, kebudayaan, keamanan dan pertahanan. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa Negara membentuk suatu kerjasama internasional.

Kerjasama internasional yang melibatkan Negara dengan non Negara dalam hubungan internasional tercipta dari pandangan saling membutuhkan dalam upaya mencapai tujuan dan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, keberadaan kerjasama internasional menjadi syarat dalam mengurangi biaya dan menyediakan informasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kerjasama internasional dapat terwujud karena beberapa hal, yaitu:²⁵

1. Pandangan terkait dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus

²⁴ Anak Agung dan Yayan Mochamad. 2017. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Buku. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.

²⁵ Umar Suryadi Bakry. 2017. Dasar-dasar Hubungan Internasional. Buku. Kencana : Jakarta.

2. Pandangan atau harapan bahwa kebijakan yang diputuskan melalui kerja sama internasional dapat membantu suatu Negara dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilai lainnya
3. Persetujuan terhadap suatu masalah di dalam hubungan internasional sehingga dapat memanfaatkan persamaan dan benturan kepentingan antar aktor di dalamnya
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai kegiatan transaksi di masa depan untuk melaksanakan dalam memenuhi tujuan dari kerjasama tersebut.

Keterkaitan antara konsep kerjasama internasional dengan penelitian ini yaitu, konsep dari kerja sama internasional direferensikan untuk menganalisis peran dan fungsi TAN yang melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan organisasi pemerintah untuk melakukan kerja sama dalam penanggulangan epidemic HIV/AIDS yang semakin kompleks pada penelitian ini, konsep kerja sama internasional di implementasikan melalui penjelasan dan analisis lebih lanjut seperti beberapa kerja sama terhadap beberapa program-program dan aksi tertentu yang memerlukan kerja sama dengan aktor-aktor internasional dalam mengelola dan membantu penanggulangan HIV/AIDS di Thailand pada tahun 2019-2022.

2.2.3 Teori *Transnational Advocacy Networks*

Penelitian ini akan menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) atau jaringan advokasi transnasional dengan empat komponennya yakni *information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics*. *Transnational Advocacy Network* atau jaringan advokasi transnasional merupakan kumpulan para aktor yang bekerja dalam suatu isu, tergabung dalam nilai-nilai dan

wacana bersama, serta terjadi pertukaran informasi dan bantuan yang padat di dalam kumpulan mereka yang bekerja secara terorganisis untuk mengangkat norma-norma maupun fenomena baru dalam skala internasional.²⁶

Setelah berakhirnya perang dingin aktor dalam hubungan internasional tidak hanya didominasi oleh negara, banyak aktor-aktor lain yang memiliki peran penting dalam interaksi hubungan internasional, seperti *Non-governmental organization* (NGOs), *multinational organization* (MNC), Individu yang berpengaruh, termasuk *Transnational Advokasi Networks* (TAN's). Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN's) yang digagas oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink sebagai alat.

Aksi kolektif di antara aktor-aktor nonpemerintah di tingkat internasional, tentu saja, bukanlah fenomena yang sama sekali baru. Hubungan internasional antara lembaga swadaya masyarakat, kelompok warga, komunitas ahli, dan serikat pekerja mulai menebal di pertengahan abad ke-19, seringkali didorong oleh keinginan untuk berbagi informasi dan menawarkan dukungan dan solidaritas timbal balik untuk gerakan reformasi nasional. Setelah hubungan internasional dibuat, banyak dari organisasi ini memainkan peran kunci dalam pembentukan perjanjian dan lembaga antar pemerintah formal contoh utama termasuk gerakan antiperbudakan abad ke-19, gerakan kelangsungan hidup anak di awal abad ke-20, dan pekerjaan gerakan buruh internasional dalam pembentukan Internasional.

²⁶ Ludong, M.J., et al. 2016. Gerakan Madres De La Plaza De Mayo dan Dampaknya Terhadap Penegakan HAM di Argentina". Jurnal WANUA Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.

Transnational Advocacy Networks (TANs) merupakan sebuah jaringan advokasi yang memiliki peran sebagai kelompok penekan terhadap sebuah isu atau kebijakan yang dinilai tidak sesuai tujuannya. Jaringan ini memiliki peran penting dalam memengaruhi kepentingan dan kebijakan suatu negara²⁷. Keck dan Sikkink mengklasifikasikan jaringan advokasi transnasional ini menjadi tujuh aktor utama, yaitu *non-government organizations* (NGOs) berskala domestik atau internasional, gerakan sosial tingkat lokal, yayasan dan media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan antarpemerintah, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.²⁸

Transnational Advocacy Networks dapat dipahami sebagai suatu gabungan dari organisasi pergerakkan yang berada di dua atau lebih negara yang berbeda.²⁹ Jaringan ini terdiri dari sejumlah aktor baik organisasi antar pemerintah, swasta, maupun organisasi non-pemerintah (NGO) level domestik hingga internasional. Aktor-aktor ini memiliki agenda yang menjadi isu utama dalam membentuk suatu jaringan transnasional, dimana isu tersebut merupakan isu minor yang berbasis kemanusiaan.

Diskusi Keck dan Sikkink (1998) tentang TAN berfokus pada bagaimana informasi, barang, dan akhirnya kekuasaan, disampaikan melalui jaringan. Meskipun organisasi lokal mungkin tidak efektif membawa perubahan hak asasi manusia sendiri. Menurut Keck dan Sikkink, TAN cenderung muncul pada isu-isu

²⁷ Kwak, S.-Y., & Lee, Y. W. 2009. Using Norms Strategically: Transnational Advocacy Networks Operation For North Korean Human Rights. *Asian Perspective*, Vol. 33, No. 1, 33-74.

²⁸ Keck, M. E., & Sikkink, K. 1999. *Transnational advocacy networks in international and regional politics*. Oxford: Blackwell Publishers.

²⁹ Brandy, J., & Smith, J. 2005. *Coalitions Across Borders: Transnational Protest and the Neoliberal Order*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers Inc.

yang memiliki resonansi yang sudah ada sebelumnya, di mana efektivitas tindakan kolektif murni domestik terbatas, namun kontak internasional dimungkinkan. Keck dan Sikkink membahas salah satu proses utama bagaimana TAN terbentuk dan bagaimana mereka mempengaruhi hasil politik sebagai pola “bumerang”³⁰ Dalam model bumerang, sebuah organisasi lokal yang telah digagalkan dalam upayanya untuk mencapai perubahan politik mengirimkan seruan kepada masyarakat internasional untuk meminta bantuan. Komunitas internasional, biasanya melalui LSM internasional yang berlokasi di negara-negara demokrasi di dunia. Menurut Keck dan Sikkink kemunculan *Transnational Advocacy Networks* (TAN) didorong oleh 3 faktor, yaitu: *activist* atau *political entrepreneurs*, *international conferences*, dan *boomerang pattern*.

Pola boomerang pattern merupakan strategi dari TAN untuk mengubah perilaku dan negara. *Transnational Advocacy Networks* akan mencari bantuan dan sekutu internasional untuk menekan pemerintah dari luar negaranya, karena pemerintah sebagai aktor penting dalam melindungi masyarakatnya tidak mampu menjalankan perannya dengan baik dan justru menutup semua akses masyarakat. Dari bantuan internasional dapat memperkuat tuntutan domestik, menggunakan ruang terbuka untuk isu-isu kemanusiaan, dan kemudian menyuarakannya ke area publik domestik.

Transnational Advocacy Networks ini menggunakan cara-cara yang dapat diaplikasikan untuk semakin mempermudah jaringan ini mencapai tujuannya. Pada

³⁰ It is worth noting that a recent lecture on the fifteenth anniversary of Keck and Sikkink (1998) at Brown University reiterated that the boomerang model is just one model of transnational advocacy. <http://watson.brown.edu/events/2015/15-years-transnational-activism-what-difference-has-it-made>

penelitian Keck dan Sikkink mengemukakan empat cara yang digunakan oleh *Transnational Advocacy Networks*, yaitu:³¹

1. *Information Politics*, kemampuan untuk memobilisasi informasi politik secara cepat dan kredibel yang berguna untuk menggerakkan target dengan mengirimkan informasi tersebut ke tempat yang mendapat pengaruh kuat.
2. *Symbolic Politics*, kemampuan dalam menyampaikan secara simbolik, baik melalui tindakan atau narasi mengenai situasi yang sedang dialami untuk menarik perhatian masyarakat lain yang berada pada jarak jauh.
3. *Leverage Politics*, kemampuan untuk menarik aktor yang memiliki power lebih kuat untuk mempengaruhi situasi tertentu dan memperkuat jaringan yang memiliki power lemah.
4. *Accountability Politics*, merupakan upaya untuk mendorong aktor yang memiliki power lebih kuat bertindak sesuai dengan kebijakan maupun prinsip-prinsip yang telah dibuat.

Transnational Advocacy Networks merupakan pengaruh dari pertumbuhan struktur global sebagai perlawanan terhadap bentuk struktur tata kelola global yang kompleks dan beraneka ragam. Konsep ini merupakan konsep yang dinilai efektif untuk menjelaskan pergerakan masyarakat sipil yang sifatnya transnasional. Sejak tahun 1990-an, aktivisme transnasional telah tumbuh bersamaan dengan institusi antarnegara dan merupakan sebuah tanggapan terhadap tantangan baru pada pemerintahan dunia³². Manuel Castells, beranggapan bahwa jaringan transnasional

³¹ Keck, M. E., & Sikkink, K. 1999. *Transnational advocacy networks in international and regional politics*. Oxford: Blackwell Publishers.

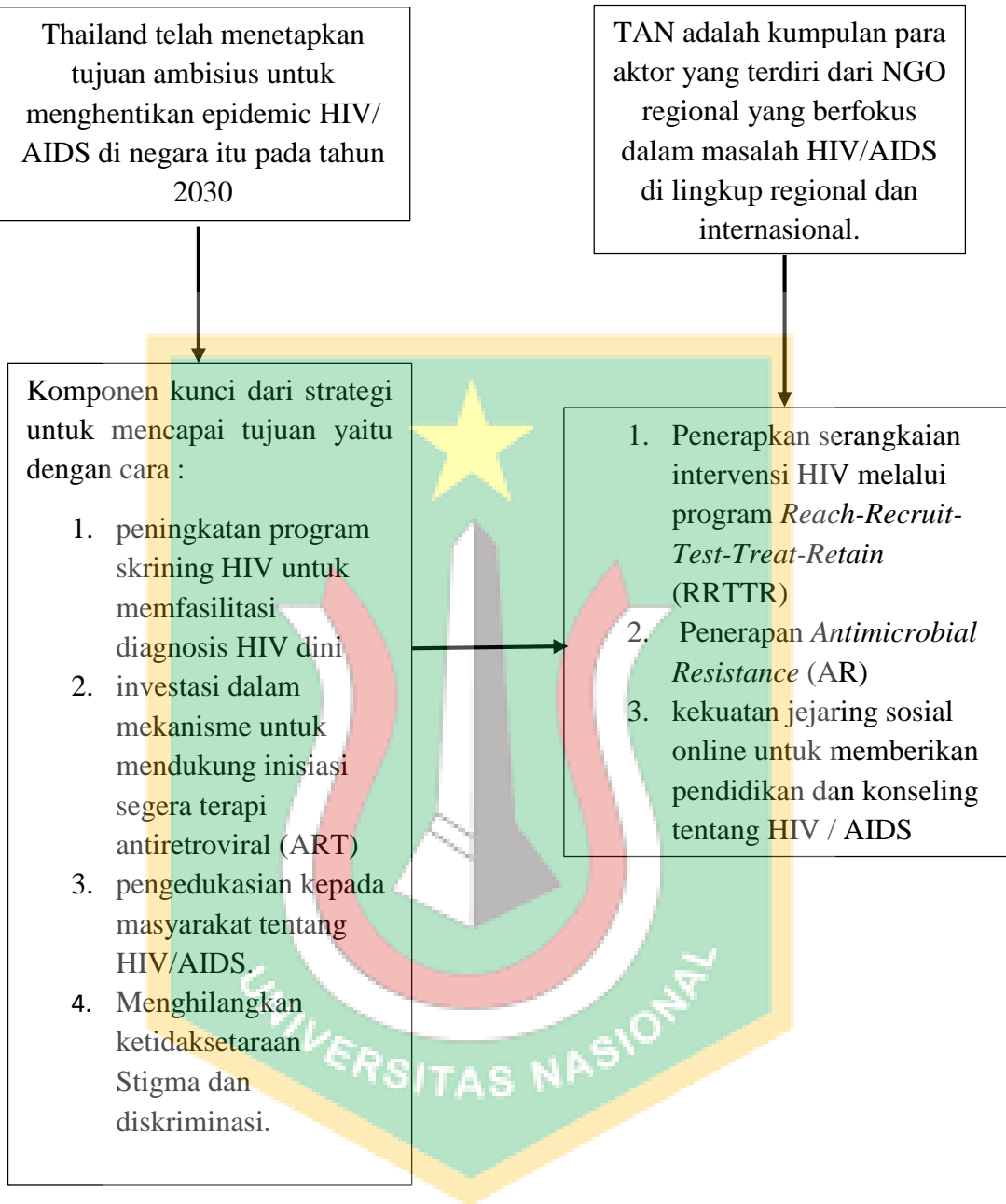
³² Gilson, J. 2011. *Transnational Advocacy: New Spaces, New Voices*. *Alternatives: Global, Local, Political*, Vol. 36, No. 4, 288-306.

tersebut turut mempengaruhi komunikasi global³³ Pergerakan masyarakat sipil transnasional dapat dijelaskan dari pola hubungan sosialnya dengan melihat jaringan yang terbangun. Castells juga menekankan pentingnya media sebagai agen perubahan yang memobilisasi politik dalam isu yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil melalui jaringan transnasional, dan membingkai opini publik, serta membawanya melintasi batas.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara jelas teori *Transnational Advocacy Networks* telah menjelaskan gerakan masyarakat sipil pada sebuah isu tertentu dan membentuk suatu jaringan transnasional. Hal ini sesuai dengan *boomerang pattern* dimana TAN memberi dorongan bagi pemerintah melalui aktor luar ketika pemerintah negaranya menutup akses. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penelitian ini menganalisa lebih jauh upaya gerakan yang dilakukan TAN di Thailand dalam upaya pencegahan dan pengedukasian penyakit HIV/AIDS pada keragaman gender di kalangan masyarakat. Selanjutnya, TAN ini mempengaruhi dan akan mendorong penerapan kebijakan tentang pencegahan HIV/AIDS. Upaya-upaya ini sebagai cara mencapai tujuan SDGs no 3 dan mengakhiri epidemi HIV/AIDS pada keragaman gender di Thailand dan memaksimalkan Kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat Thailand.

³³ Castells, M. 2008. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, No. 1, 78-93.

2.3 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran pada penelitian ini dijelaskan sebagai gambaran besar atau alur sistematis pada topik yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti menggunakan konsep dan teori yang sesuai dengan topik tersebut agar dapat dikaitkan ke dalam beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Peneliti memfokuskan pada topik cara penanggulangan dan pengedukasian terkait HIV/AIDS di Thailand pada tahun 2019-2022 yang disebabkan pada program ambisius Thailand dalam penanggulangan HIV/AIDS di tahun 2030 yang mana program ini juga tercantum dalam program SDG 3.

Dengan adanya program ambisius tersebut, peneliti menelaah peran lembaga-lembaga masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berdedikasi terhadap permasalahan HIV/AIDS untuk membantu pemerintah Thailand dalam memaksimalkan program ambisius Thailand pada tahun 2030 tersebut. Lembaga-lembaga masyarakat dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional sehingga menciptakan kerja sama internasional dan membentuk suatu jaringan advokasi yang biasa disebut TAN untuk memberikan pelayanan seperti pemberian terapi *antiretroviral* (ART), pemberian layanan PMTCT (*Prevention of Mother-To-Child Transmission*) dalam pencegahan penularan ibu ke anak, dan memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang stigma HIV/AIDS di berbagai platform khususnya di media sosial. Berikut gambaran kerangka pemikiran yang telah dibuat penulis sebagai gambaran besar keseluruhan penelitian.